

Pengamanan Ketat, Aksi Hearing Mahasiswa di Kantor Gubernur NTB Berlangsung Kondusif

Syafruddin Adi - MATARAM.SAPA129.COM

Feb 12, 2026 - 17:11



Mataram, NTB – Aparat kepolisian dari Polresta Mataram dan Polsek Mataram mengawal ketat aksi hearing atau audiensi yang digelar massa mahasiswa Suara Mahasiswa Untuk Demokrasi Rakyat (SAMUDRA) NTB di Kantor Gubernur NTB, Kamis (12/02/2026) pagi. Audiensi tersebut digelar menyusul keluhan publik

terkait gangguan sistem Bank NTB Syariah yang berdampak pada keterlambatan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) serta hambatan transaksi keuangan masyarakat.

Kapolsek Mataram, AKP Mulyadi, S.H., selaku penanggung jawab wilayah, menegaskan bahwa prioritas kepolisian adalah memastikan penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan sesuai koridor hukum, tanpa mengganggu stabilitas keamanan.

“Kami menurunkan personel gabungan secara terbuka dan tertutup untuk mengawal jalannya hearing. Fokus kami adalah menjamin keamanan peserta aksi dan pihak pemerintah agar dialog berjalan aman dan beradab,” ujar AKP Mulyadi.

Audiensi yang berlangsung di Ruang Anggrek tersebut dipimpin Korlap SAMUDRA NTB, Hendrawan. Dalam forum itu, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya desakan pencopotan jajaran direksi Bank NTB Syariah, pelaksanaan audit independen, serta evaluasi menyeluruh tata kelola BUMD oleh Gubernur NTB.

Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Bank NTB Syariah, Rahman Kamarud Zaman, menjelaskan bahwa gangguan pada layanan mobile banking merupakan kendala teknis awal tahun yang tengah ditangani secara bertahap. Sementara itu, perwakilan BPKAD NTB, Rizki, menyebut keterlambatan gaji ASN juga dipengaruhi proses restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.

AKP Mulyadi menambahkan, sebelum audiensi dimulai, aparat telah melakukan penggalangan dan komunikasi persuasif kepada massa aksi guna mencegah potensi gesekan.

“Berkat kesadaran bersama, kegiatan yang berlangsung hampir satu jam berakhir pukul 10.46 WITA dalam situasi aman dan kondusif. Kami mengapresiasi sikap tertib mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi NTB melalui perwakilannya memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh pada semester pertama tahun ini agar layanan perbankan dan administrasi keuangan daerah kembali berjalan normal serta kepercayaan publik tetap terjaga.(Adb)